



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI V DPR RI
DENGAN
DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT DAN DIRJEN PERKERETAAPIAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI**

- Tahun Sidang : 2023-2024
Masa Persidangan : I
Rapat Ke- : Ke-8
Jenis Rapat : RDP
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Senin, 4 September 2023
Waktu : Pukul 13.25 s.d. 15.15 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi V DPR RI, (Ruang KK V)
Gedung Nusantara DPR RI
Ketua Rapat : Roberth Rouw (F-P. NASDEM) – Wakil Ketua Komisi V DPR RI
Acara : Membahas alokasi anggaran menurut fungsi dan program masing-masing unit Eselon I K/L mitra kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN TA. 2024
Sekretaris Rapat : Nunik Prihatin Budiastuti, S.H., Kabag Komisi V DPR RI
Hadir : A. Anggota DPR RI:
27 dari 55 orang Anggota dengan rincian:
1. FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)
5 dari 12 orang Anggota
1. Hj. Sadarestuwati, S.P., M.MA.
2. Sarce Bandaso Tandiasik, S.H., M.H.
3. Sri Rahayu
4. Harvey B. Malaihollo
5. Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos., MCOMN&MEDIAS
2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)
4 dari 8 orang Anggota
1. Ir. Ridwan Bae
2. Drs. Hamka B Kady, M.S.
3. Cen Sui Lan
4. Muhammad Fauzi, S.E.
3. FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA)
3 dari 7 orang Anggota
1. Ir. Sumail Abdullah
2. Ir. Eddy Santana Putra, M.T.

3. Drs. H. Mulyadi, M.MA.
4. FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM)
3 dari 6 orang Anggota
 1. Roberth Rouw
 2. H. Syarif Abdullah Alkadrie, S.H., M.H.
 3. Drs. H. Soehartono, M.Si.
5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)
5 dari 6 orang Anggota
 1. H. Ruslan M. Daud, S.E., M.A.P.
 2. H. Irmawan, S.Sos., M.M.
 3. H. Dedi Wahidi, S.Pd.
 4. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, M.M.
 5. H. Syafiuddin, S.Sos.
6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)
3 dari 5 orang Anggota
 1. Dr. H. Irwan S.IP., M.P.
 2. Willem Wandik
 3. Drs. H. Anwar Hafid, M.Si.
7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)
1 dari 5 orang Anggota
 1. H. Suryadi Jaya Purnama, S.T.
8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)
2 dari 4 orang Anggota
 1. H. Boyman Harun, S.H.
 2. Hj. Hanna Gayatri, S.H.
9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)
1 dari 2 orang Anggota
 1. Dr. H. Muh Aras, S.Pd., M.M.

B. UNDANGAN:

1. Plt. Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Dr. Capt. Antoni Arif Priadi, M.Sc.).
2. Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI (Ir. Mohamad Risal Wasal, ATD., MM., IPM),

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT/F-P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Dirjen Perhubungan Laut dan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, hari Senin tanggal 4 September 2023, pukul 13.25.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang, dan

Salam sejahtera bagi kita semua.

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI,
Yang terhormat Dirjen Perhubungan Laut dan Dirjen Perkeretaapian
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia beserta seluruh
jajarannya,
Yang terhormat para Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Seluruh
Indonesia dan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian,
Yang terhormat Direktur Utama PT Pelni, dan PT Pelindo, PT KAI, PT
Kereta Commuter Indonesia, PT LRT Jakarta, dan PT KCIC, serta
Hadirin yang kami hormati,**

Mengawali rapat hari ini marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat bertemu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dalam keadaan sehat walafiat.

Menurut laporan dari Sekretariat Komisi V DPR RI saat ini rapat Komisi V DPR RI telah diikuti oleh 20 orang dari 55 Anggota yang terdiri dari 8 fraksi yang sudah sehingga telah memenuhi kuorum. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 281 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, izinkanlah kami membuka rapat dengar pendapat pada hari ini dan sesuai ketentuan Pasal 276 ayat (1) pada rapat hari ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.25 WIB)

Terima kasih kepada Dirjen Perhubungan Laut dan Dirjen Perkeretaapian beserta jajarannya yang telah memenuhi undangan kami pada rapat dengar pendapat hari ini, menghadirkan juga para Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Seluruh Indonesia dan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian serta para Operator Perusahaan Perhubungan Laut dan Perusahaan Perkeretaapian dengan agenda membahas alokasi anggaran menurut fungsi dan program masing-masing Unit Eselon I mitra kerja Komisi V DPR RI dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2024.

**Pimpinan,
Anggota Komisi V DPR RI, dan
Para Dirjen Kementerian Perhubungan, serta
Hadirin yang kami hormati,**

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus tahun 2023 yang lalu telah disepakati beberapa hal di antaranya: Komisi V memahami penjelasan Kementerian Perhubungan mengenai alokasi anggaran Kementerian Perhubungan dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2024 sebesar 38,47 triliun. Dari alokasi tersebut, anggaran untuk Ditjen Perhubungan Laut sebesar 9,49 triliun yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan antara lain: Dukungan IKN dan kawasan strategis pariwisata nasional, penyelenggaraan angkutan tol laut, lanjutan pembangunan pengembangan dan rehab fasilitas pelabuhan, pembangunan dan rehabilitasi sarana bantu navigasi pelayaran, serta pembangunan dan rehabilitasi telekomunikasi pelayaran. Selanjutnya, anggaran Ditjen Perkeretaapian sebesar 9,68 triliun akan dipergunakan untuk mendukung kegiatan antara lain: Dukungan IKN, layanan keperintisan perkeretaapian pembangunan, dan peningkatan prasarana serta peningkatan keselamatan perkeretaapian.

Sejalan dengan itu, dalam kesempatan ini kami ingin tegaskan kembali agar dalam proses penyusunan anggaran Tahun Anggaran 2024 agar masing-masing unit organisasi Eselon I benar-benar dapat memperhatikan dan mengakomodir saran dan masukan dari Komisi V DPR RI. Selanjutnya, berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi V DPR RI terdapat sejumlah isu strategis yang perlu mendapat perhatian dari Dirjen Perhubungan Laut dan Dirjen Perkeretaapian antara lain:

1. Terutama terkait dengan pembangunan IKN perlu penjelasan tentang perencanaan desain konektivitas logistik di IKN;
2. Perlu menyampaikan kondisi eksisting konektivitas transportasi laut khusus di daerah T3P dan rencana program konektivitas transportasi laut pada Tahun Anggaran 2024;
3. Meningkatkan pengawasan terhadap keselamatan dan keamanan transportasi laut dan perkeretaapian;
4. Meningkatkan kebijakan pengelolaan potensi penerimaan dan pemanfaatan PNBPN di sektor laut dan perkeretaapian.

Saudara-Saudara yang berbahagia,

Demikian pengantar dari kami.

Selanjutnya kepada Dirjen Perhubungan Laut dan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan untuk menyampaikan penjelasan sesuai dengan agenda rapat pada hari ini.

Sebelum saya mempersilakan kepada Dirjen Perhubungan Laut, saya minta Bapak perkenalkan Saudara perkenalkan diri karena ini Dirjen yang Pak Toha sudah di jadi Irjen maka beliau ini sebagai Plt ya, mungkin nanti bisa perkenalkan diri untuk Anggota.

Baik.

Saya persilakan, silakan Plt. Dirjen Perhubungan Laut.

**Plt DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
(Dr. Capt. ANTONI ARIF PRIADI, M.Sc.):**

Bismillahirrahmanirrahim.

**Yang terhormat Ketua Komisi V,
Wakil Ketua Komisi V,
Para Anggota Komisi V,
Para hadirin yang kami muliakan,**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om swastiastu,
Namo budhaya,
Salam kebajikan.

Terima kasih, Pimpinan atas waktu yang telah diberikan.

Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Antoni Arif Priadi, saya jabatan tetapnya adalah Staf Ahli Menteri Bidang Kawasan Dan Lingkungan Perhubungan sekaligus diberikan amanah untuk menjabat sebagai Plt. Dirjen Perhubungan Laut.

Pada kesempatan yang baik ini kami perlu menyampaikan kepada Pimpinan dan Anggota yang terhormat untuk Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, seluruh Kepala UPT kami undang ada yang hadir secara fisik maupun hadir secara daring sekaligus juga kami undang *stakeholder* kami PT Pelni dan PT Pelindo.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih setinggi-tingginya atas dukungan para Pimpinan dan Anggota Dewan Komisi V DPR RI yang selalu mendukung Direktorat Jenderal Perhubungan Laut selaku mitra kerja dan perwakilan dari pemerintah untuk terus melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja dalam rangka memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat Indonesia selaku pengguna jasa transportasi laut.

Para Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI yang saya hormati,

Dalam penyusunan alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tahun 2024, tentunya kami mengikuti tema prioritas dan kebijakan RKP tahun 2024 di mana fokusnya adalah untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dan di dalam tema tersebut terdapat 7 prioritas nasional. Arah kebijakan RKP tahun 2024 seperti yang tadi Pimpinan sampaikan salah satunya adalah percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Dan kami juga menyampaikan arahan Presiden yang disampaikan tanggal 2 Maret 2023 Jangan sampai ada pembangunan atau program yang tidak terselesaikan di 2024 ini menjadi acuan kami Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam menyusun anggaran di tahun 2024.

Di halaman berikutnya, kami perlu juga sampaikan terdapat enam pokok terkait dengan apa menjadi Tusi dari Perhubungan Laut:

1. Terkait dengan perwujudan angkutan laut yang murah, mudah, simpel, dan kompetitif;
2. Peningkatan konektivitas transportasi laut yang tadi juga disampaikan oleh Pimpinan terkait dengan 3TP;
3. Penyediaan infrastruktur pelabuhan laut yang berdaya saing;
4. Peningkatan kepatuhan terhadap regulasi keselamatan, keamanan, dan perlindungan lingkungan maritim;
5. Peningkatan efektivitas penegakan hukum di laut;
6. Atau yang terakhir adalah peningkatan integrasi dalam pengelolaan organisasi.

Pada halaman 4 sampai dengan halaman 10, mohon izin ini adalah terkait dengan apa yang kita capai di tahun 2023 sehingga kami langsung ke anggaran... izinkan kami langsung ke anggaran di tahun 2024 pada halaman 10. Untuk anggaran 2024, strategi yang kita akan lakukan yang pertama terkait dengan belanja pegawai adalah ketepatan perhitungan alokasi belanja pegawai sesuai dengan jumlah *existing* pegawai. Kami di Perhubungan Laut kurang lebih ada 14.000 pegawai yang tersebar di 321 Satker di Indonesia. Kemudian belanja barang ini lebih kepada pengalokasian belanja subsidi keperintisan, tol laut, ternak, dan TD secara efektif dan efisien dengan memperhatikan penggunaan trayek-trayek preferensi kapasitas penyerapan anggaran dengan *baseline* tahun 2023 serta kondisi perubahan lingkungan strategis terutama adalah kenaikan bahan bakar.

Kemudian juga adalah pengalokasian belanja perjalanan dinas. Sedangkan untuk belanja modal lebih kepada pemenuhan kegiatan *multi years contract* sampai tahun 2024, kemudian juga ada pengolahan lokasi pendukung kawasan strategis dengan prioritas nasional 3TP, destinasi pariwisata nasional dan kawasan Industri, termasuk kegiatan prioritas nasional melalui pemberian SBSN dan PHLN. Dan juga pada tahun 2024 ini adalah tetap dialokasikan

untuk kegiatan padat karya dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Anggaran tahun 2024 dapat disampaikan pagu kebutuhan adalah sebesar 14,7 triliun dan pagu alokasi adalah 9,499 triliun, masih terdapat selisih 4,31 triliun. Rincian dari pagu anggaran di 2024 adalah belanja pegawai ini ada 1,7 untuk belanja pegawai, 4,9 untuk belanja barang, dan 2,79 untuk belanja modal.

Kemudian kami membagi ke dalam direktorat. Dari total 9,4 triliun tersebut maka bidang lalu lintas dan angkutan laut sebesar 2,2 triliun, bidang ke pelabuhanan 2,5 triliun, bidang kenavigasian 635 miliar, bidang kesatuan penjagaan laut dan pantai 371 miliar, bidang perkapalan dan kelautan 280,6 miliar, dan dukungan manajemen dan penunjang teknis untuk 302 satuan kerja sebesar 3,6 triliun.

Sebaran program kegiatan prioritas nasional Ditjen Perhubungan Laut untuk bidang kepelabuhanan, dapat kami sampaikan terdapat 31 kegiatan dengan total anggaran 3,79. Untuk bidang kepelabuhan sendiri terdapat 31 pelabuhan dari mulai kepelabuhan yang ada di Patimban, Anggrek, Baubau, Teluk Palu, kemudian ada Namlea, Sungai Nyamuk, Matui, Lewoleba, Pelabuhan Ratu, dan seterusnya.

Untuk bidang angkutan laut, lalu lintas dan angkutan laut sebesar 2 triliun ini lebih kepada penyelenggaraan angkutan tol laut, perintis, dan ternak. Sedangkan bidang KPLP ini lebih banyak kepada pembangunan kapal patroli melalui PHLN. Dan untuk bidang kenavigasian terdapat 14 program yang lebih kepada peningkatan sarana bantu navigasi di distrik navigasi di 14 lokasi.

Kemudian secara detail contoh untuk rekapitulasi rincian program kegiatan pagu anggaran tahun 2024 bidang lalu lintas angkutan laut totalnya adalah 2,2 triliun terbagi menjadi 8 program kegiatan. Yang pertama adalah angkutan laut perintis penugasan dan swasta ini prioritas nasional sebanyak 116 trayek dengan total anggaran 1,4 triliun, pelayanan angkutan kapal ternak sebanyak 6 trayek dengan anggaran 66,4 miliar, penyelenggaraan pelayanan angkutan barang tol laut mekanisme penugasan dan swasta ini lebih ke daerah 3TP, Pimpinan, dengan jumlah 39 trayek dengan anggaran 544 miliar, penyelenggaraan Kapal Rede, *Docking* Kapal Tol Laut, program mudik gratis angkutan lebaran, pengembangan dan pemilihan sistem informasi bidang lalu lintas angkutan laut melalui Inaportnet, Simpadu, dan lain-lain, serta kegiatan-kegiatan pendukung bidang lalu lintas angkutan laut termasuk Bimtek, studi dan sebagainya.

Yang berikutnya adalah bidang kepelabuhanan dengan total anggaran 2,5 triliun di mana terdapat 10 program kegiatan. Yang pertama adalah pembangunan fasilitas pelabuhan baru hanya 2 paket saja, kemudian lanjutan

pembangunan fasilitas pelabuhan ada 3 paket, pengembangan fasilitas pelabuhan ada 14 paket, *replacement* fasilitas pelabuhan 8 paket, rehab faspel 19 paket, kemudian pembangunan rehab *replace* gedung operasional pelabuhan 67 paket, pembangunan rehab *replace* pendukung operasional pelabuhan termasuk pengadaan vendor, penerangan jalan dan pagar 119 paket, pengadaan peralatan pengadaan tanah 13 paket, *operation and maintenance* pemeliharaan pada kantor UPT sebanyak 249 kantor, dan kebutuhan penunjang teknis sebanyak 1 kegiatan.

Pimpinan dan Anggota yang kami hormati,

Untuk bidang kenavigasian dengan jumlah total anggaran 635 miliar terdapat 6 program kegiatan yang lebih kepada untuk armada dan pangkalan, pengadaan perlengkapan dan peralatan penunjang alur dan perlintasan, pembangunan atau rehab *replace* rehabilitasi sarana bantu navigasi pelayanan 30 paket, dan kegiatan penunjang lainnya sebanyak 117 paket.

Berikutnya adalah bidang KPLP (Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai) dengan total anggaran 371 miliar terdapat 11 program kegiatan mulai dari *docking* besar kapal patroli, ini kita punya tahun ini 2024, 106 paket untuk kegiatan *docking*, kemudian ada hal-hal lain termasuk pengadaan tanah, bengkel, rehab dermaga KPLP dan seterusnya.

Kemudian lanjutan untuk bidang KPLP adalah sebesar 80,6 miliar untuk pengembangan dan penambahan perangkat sistem informasi SID berbasis *smart card*, kemudian pengembangan dan penambahan perangkat sertifikasi pelaut, mohon maaf, ini untuk bidang perkapalan dan kelautan dan kegiatan penunjang teknis lainnya termasuk kantor BKKP untuk keselamatan dan keamanan transportasi laut dan kantor BTKP keselamatan dan keamanan transportasi laut dengan jumlah total 80 miliar.

Kemudian total dukungan manajemen penunjang teknis untuk 302 Satker sebesar 3,6 triliun, gaji dan tunjangan kinerja untuk pegawai PNS dan PPNPN atau honorer jumlahnya total adalah 20.586 pegawai dengan anggaran 1,7 triliun. Belanja operasional di 296 UPT dan 6 Satker senilai 1,5 triliun, dan belanja tidak mengikat di 296 UPT dan 6 Satker sebesar 300 miliar. Terkait dengan padat karya, kami perlu sampaikan Ketua dan Anggota yang kami hormati terdapat di 38 provinsi. Jenis pekerjaannya adalah pemeriksaan fasilitas sisi darat pelabuhan termasuk gedung, kantor, operasional, lapangan penumpukan, drainase, terminal penumpang, gudang dan kegiatan pembersihan kapal perintis dengan target tenaga kerja 9.214 orang, tenaga kerja orang hari 74.498 orang per hari dengan anggaran upah sebesar 16,3 miliar.

Sebaran pembangunan infrastruktur transportasi laut pada anggaran 2024 di Pulau Sumatera. Terdapat 10 titik dimulai dari Aceh dengan besaran

28 miliar, kemudian di Sumatera Utara, kemudian di Riau, Kepulauan Riau, Jambi, kemudian Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Sumatera Barat, dan Lampung. Ini ada titik-titik Anggota Dewan dapat melihat besaran yang ada di masing-masing titik.

Kemudian untuk Pulau Jawa terdapat 5 titik dimulai dari Banten, DKI, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Kemudian untuk Sulawesi untuk daerah Pulau di Sulawesi terdapat 6 titik mulai dari Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah dengan detail yang ditampilkan dalam presentasi.

Kemudian untuk Pulau Kalimantan terdapat 5 titik meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur. Untuk Maluku Utara dan Maluku ini ada titik di Maluku Utara dan di Maluku di mana untuk Maluku utara sebesar 324 miliar dan Maluku 490 miliar sedangkan di daerah Bali, NTB, dan NTT terdapat 3 titik. Papua terdapat 2 titik, untuk Papua Barat 178,9 miliar dan Papua 211 miliar.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dan tentunya kami mohon masukan dan arahan sehingga pelaksanaan anggaran 2024 ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik.

Selanjutnya Dirjen Perkeretaapian silakan.

**DIRJEN PERKERETAAPIAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
(Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, ATD., MM., IPM):**

Baik.

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Yang kami hormati Ketua Komisi V DPR RI,
Bapak-Ibu Wakil Ketua Komisi V serta setiap Anggota Komisi V,
Pak Dirjen Perhubungan Laut beserta yang kami hormati Direktur Badan
Usaha yang hadir pada kesempatan ini, serta
Teman-teman Kepala Balai dan KSOP yang ada hadir,**

Bapak-Ibu Pimpinan, izinkan kami laporkan rencana alokasi anggaran menurut fungsi program dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Mengawali dari paparan kami, izinkan kami laporkan rencana kerja dan anggaran tahun 2024. Berdasarkan rencana strategis dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian, target panjang yang akan kami bangun secara kumulatif pada tahun 2024 sebesar 7.451 kilometer sepur dan telah tercapai pada tahun 2023 pada periode Agustus sebesar 6.817 kilometer sepur. Kemudian target kondisi jalur kereta api sesuai dengan TKI 1 kategori 1 dan 2 dimana TKI 1 itu adalah dengan kemampuan kecepatan maksimum 100 sampai 120 dan 2 adalah maksimum 80 sampai 100 ditargetkan pada tahun 2024 mencapai 94% dan telah tercapai pada tahun 2023 periode Agustus sebesar 92,42%.

Selanjutnya, target jumlah Kota Metropolitan dengan SAUM (Sistem Angkutan Umum Massal) perkotaan berbasis rel seperti Jakarta, Bandung, Semarang Surabaya, Medan, dan Makassar ditargetkan pada tahun 2024 sebanyak 6 kota dan capaian pada tahun 2023 periode Agustus sudah terbangun di 4 Kota yaitu di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan. Untuk rasio kejadian kecelakaan kereta api per 1.000.000 kilometer tempuh pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 0,22 dan capaian pada tahun periode Agustus sebesar 0,21. Kemudian rata-rata target *on time performance* pada tahun 2024 adalah sebesar 82% dan capaian pada tahun 2023 hingga periode Agustus sebesar 91%.

Pimpinan dan segenap Anggota Komisi V yang kami hormati,

Kami laporkan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah atau RKP tahun 2024 dengan tema: "Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan dalam Rangka Pencapaian Prioritas Nasional" terdapat 3 *major project* bidang perkeretaapian yaitu pengoperasian kereta Makassar-Parepare, dukungan fasilitas perkeretaapian antara Padalarang Bandung untuk operasional KA *feeder* serta Sistem Angkutan Umum Metropolitan (SAUM) di Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang dan Makassar. Untuk kegiatan, sebagaimana di dalam hal ini yang kami sampaikan. *Next*.

Pimpinan dan segenap Anggota Komisi V yang kami hormati,

Berdasarkan kebutuhan pendanaan sesuai Renstra selain dalam memenuhi target dan mengakomodir *backlog* pembangunan dibutuhkan pendanaan sebesar 28,34 triliun. Namun, di dalam pendanaan berikutnya secara realistis dalam pencapaian target menghasilkan kebutuhan sebesar 15,03 triliun. Dan kemudian berdasarkan surat bersama Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan RI, perihal: Pagu Indikatif serta surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, perihal: Penyampaian Pagu Indikatif Tahun 2024 diperoleh pagu indikatif Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar 9,68 triliun. Sedangkan untuk pagu anggaran 2024 adalah sebesar 9,7 terdapat tambahan belanja pegawai sebesar 4 miliar yang

menghasilkan pagu anggaran sebesar 9,689 triliun Rp9.600.130.480.000,00 dengan komposisi sebagaimana yang terlampir di dalam layar ini, Pak Pimpinan.

Selanjutnya, kami sampaikan postur pagu anggaran tahun 2024 Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan total alokasi tadi sebesar 9,68 triliun dengan rincian sebagai berikut:

Pertama, untuk belanja pegawai sebesar 145,53 miliar di mana total kebutuhan belanja pegawai sebesar 172,4 miliar atau terdapat kekurangan sebesar 27,93 miliar dikarenakan adanya penambahan SDM di antaranya penambahan pola pembibitan CPNS sebanyak 186 orang dan PPPK sebanyak 44 orang serta kenaikan gaji sebesar 8%. Kedua, ada belanja barang operasional sebesar 105,88 miliar. Yang ketiga, belanja barang non operasional sebesar 2,76 triliun dengan mengakomodir kegiatan pengoperasian dan perawatan pelaksana kereta api, peningkatan pelayanan kereta api, *availability payment* untuk kereta Makassar-Parepare, perintisan kereta api dan angkutan motis mendukung IKN, pemenuhan *readiness criteria*, penguatan fungsi regulator, serta kegiatan keselamatan dan operasional pelayanan. Untuk belanja modal dengan sumber dana rupiah murni sebesar 270,71 miliar dengan mengakomodir kegiatan dengan skema *multi years contract* dan pemenuhan *readiness criteria* dan pelaksanaan organisasi. Selanjutnya, belanja modal dengan sumber dana SBSN sebesar 6,31 triliun dengan mengakomodir kegiatan lanjutan pada tahun sebelumnya sebesar 4,02 triliun dan kegiatan baru sebesar 2,28 triliun. Belanja modal dengan sumber dana PHLN sebesar 15,45 miliar; setelah belanja modal, belanja barang dan modal dengan sumber dana BLU sebesar 74 miliar.

Pimpinan dan segenap Anggota Komisi V DPR RI yang saya hormati,

Selanjutnya, kami sampaikan *highlight* prioritas kegiatan tahun 2024 pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Pertama ada 11 kegiatan pembangunan prasarana kereta api antara lain pada Lintas Mandai Palanro, Jalur Ganda Solo Balapan Kalioso, Medan-Binjai, Jalur Ganda Kiaracondong-Cicalengka, Jalur Ganda Mojokerto sepanjang *underpass* B421 Jatibarang, Padalarang-Bandung, Gardu Traksi Delanggu, pembangunan fasilitas perawatan dan proses pengerjaan KA, pengadaan material rel dan WSR 54, serta pembayaran kewajiban *availability payment* dari Makassar-Parepare.

Lalu juga ada 17 kegiatan peningkatan kapasitas prasarana. Selanjutnya ada 10 peningkatan kegiatan keselamatan kereta api di antaranya adalah *infrastructure maintenance operation*, kegiatan peningkatan pelantasan 108 lokasi, penanganan daerah rawan dan jembatan Tarahan-Tanjung Enim, penanganan rinja dan peningkatan 5 BA Lintas Lubuk Alung Kayu Tanam,

penanganan rinja Lintas Panjer-Kroya segmen Kawunganten-Jeruklegi, peningkatan 2 WA KA Lintas Prupuk-Purwokerto, peningkatan 2 BA Tarahan-Tanjung Enim, peningkatan BA 343 Kisaran-Tanjung Balai, dan peningkatan 2 BA Karas-Ngadiuli dan Temugurus-Singojuruh, serta sosialisasi keselamatan perekeretaapian.

Untuk kegiatan IKN, untuk kegiatan IKN ada 7 kegiatan dari kami. Yang pertama Studi Amdal Jalur KA Bandara Sultan Aji Muhammad Sepinggán, Balikpapan menuju KIPP IKN, yang kedua ada studi Amdal jalur KA Perkotaan Balikpapan menuju KIPP IKN, dan SID KA Antar Kota Trans Kalimantan di Kalimantan Timur.

Sementara untuk kegiatan perintis ada 7 kegiatan perintis kereta api yaitu untuk melayani jalur lintas Muara satu Kuta Blang, Tebing Tinggi-Lalang Binjai, Tebing Tinggi-Lalang, Binjai-Besitang Sei Liput, Lubuk Alung-Kayu Tanam, LRT Sumatera Selatan, KA Makassar-Parapare, dan Rantau Prapat Pondok S5.

Dalam peningkatan *readiness criteria* ada 4 kegiatan yang kami siapkan yaitu pertama adalah untuk penyiapan dokumen perencanaan perkeretaapian di Jabodetabek dan Surabaya.

Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI yang saya hormati,

Selanjutnya, kita lihat rincian daripada program pengembangan perkeretaapian yang mulai dari Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Untuk Provinsi Aceh dan Sumatera Utara selain kegiatan *major project* terdapat beberapa kriteria yaitu penanganan perlintasan di 14 lokasi dan pendampingan supervisi pelaksanaan *infrastructure maintenance operation* di wilayah BTP kelas 1 Medan. Selanjutnya, untuk Provinsi Sumatera Barat terdapat kegiatan penanganan perlintasan di 23 lokasi, pendampingnya supremasi berdasarkan IMO di WBTP Kelas II Padang, dan sterilisasi jalur KA Naras-Sungai Limo dan kegiatan pemeliharaan perawatan dan pengoperasian fasilitas pelaksanaan kereta api.

Selanjutnya, pada Sumatera Selatan dan Lampung terdapat kegiatan jasa penyediaan angkutan *feeder* LRT Sumatera Selatan, pengadaan 1 unit railways crane termasuk gerbong datar, dan kereta panel serta pendampingan atas supervisi pelaksanaan IMO di wilayah BTP Kelas II Palembang.

Pada Provinsi Banten, DKI dan Jakarta terdapat kegiatan pengadaan rel dan wesel terpusat yang akan diperuntukkan untuk kegiatan peningkatan pembangunan di Pulau Jawa, kegiatan IMO di wilayah Sumatera dan Jawa termasuk supervisi dan serta penanganan perlintasan di 10 lokasi. Sementara pada Provinsi Jawa Barat terdapat kegiatan penanganan perlintasan di 7 lokasi, pendampingnya supervisi perasaan IMO di BTP Bandung, dan

penyiapan *readiness criteria* untuk pembangunan jalur kereta api menuju Pelabuhan Patimban.

Untuk Provinsi DIY, Jawa Tengah dan DIY terdapat kegiatan penanganan perlintasan di 33 lokasi dan pendampingan atau supervisi pelaksanaan IMO di BTP Kelas I Semarang. Untuk Jawa Timur terdapat kegiatan penanganan perlintasan di 21 lokasi dan pendampingan supervisi pelaksanaan IMO di wilayah BTP Kelas I Surabaya. Terakhir pada Provinsi Sulawesi Selatan terdapat kegiatan mendukung untuk pengoperasian KA Maros-Karongkong dengan *availability payment* KPBU Makassar-Parepare serta penyiapan *readiness criteria* untuk lanjutan Makassar New Port dan Bandara Sultan Hasanuddin.

Pimpinan dan segenap Anggota Komisi V DPR yang saya hormati,

Selanjutnya, kami akan menyampaikan indikasi kegiatan padat karya pada tahun 2024 yang akan dilaksanakan di 8 balai atau Satker Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang melibatkan tenaga kerja sebanyak 1.020 orang atau sebanyak 100.064 orang hari yang diperkirakan akan menyerap upah sebanyak Rp11,11 miliar. Diharapkan kiranya akan ikut membantu program pemulihan ekonomi nasional terutama untuk net menengah kebawah yang berada disekitar lokasi pengerjaan pembangunan perkeretaapian.

Demikian sebagaimana di dalam *slide* ini Bapak-Ibu Pimpinan yang kami hormati.

Pimpinan dan segenap Anggota Komisi V DPR yang saya hormati,

Demikian yang dapat kami sampaikan terkait program rencana kegiatan 2024 Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Selanjutnya, mohon perkenan dukungan, saran, dan masukan dari segenap Anggota Komisi V DPR RI yang terhormat guna mewujudkan penyelenggaraan transportasi massal kereta api yang efektif, efisien, terjangkau bagi masyarakat yang mampu menjawab tantangan ke depan.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Demikianlah pengantar dari penjelasan yang telah disampaikan oleh Dirjen Perhubungan Laut dan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

Selanjutnya sebelum saya mempersilakan kepada Anggota untuk menyampaikan pendalaman dan pertanyaan.

INTERUPSI F-PDIP (Hj. SADARESTUWATI, S.P., M.MA.):

Interupsi, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya, saya tahu. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa hari ini saya lihat di dalam sini ada dari Pelni dan Pelindo, KAI, dan artinya menurut saya, teman-teman ini tidak pantas ikut di dalam rapat pada siang hari ini karena kalau pengawasan mungkin mereka boleh ikut. Tapi kita bicara anggaran nanti ada yang cawe-cawe di sini lagi di kita susah ini. Kita bicara dengan mitra ya mereka operator mereka tidak perlu hadir di dalam sini. Kalau kita bicara tentang pengawasan, mungkin mereka bisa hadir bersama kita.

Saya minta tanggapan teman-teman.

F-PDIP (Hj. SADARESTUWATI, S.P., M.MA.):

Pimpinan

KETUA RAPAT:

Silakan, Bu Estu

F-PDIP (Hj. SADARESTUWATI, S.P., M.MA.):

Terima kasih, Pimpinan.

Sebelumnya saya mohon maaf Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V juga mitra tentunya. Kami di sini ada namanya rapat, rapat kerja yang tentunya menghadirkan menteri, ada rapat dengar pendapat Eselon I dan ke bawahnya, dan ada rapat dengar pendapat Umum yang bisa diikuti oleh di luar dari kementerian atau lembaga. *Nah*, karena kita di sini berbicara anggaran, Pimpinan, ya tentunya ini adalah rapat dengar pendapat bukan rapat dengar pendapat umum yang tentunya tugas kita adalah tugas pengawasan. Jadi mohon kiranya ini coba dievaluasi kembali karena yang mengundang dari komisi ya. Jadi dievaluasi kembali kalau mau dilanjutkan tentunya kita tidak berbicara pada tataran anggaran, hanya pada tataran pengawasan saja ya. Tetapi alangkah baiknya kalau memang sudah dipersiapkan berbicara sebagai kelanjutan dari rencana RKA K/L kemarin tentunya sebaiknya diskors dulu untuk membicarakan dengan mitra yang lainnya.

Itu menurut saya, Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik.

saya kira apa disampaikan Bu Estu ya ini tadi kami akan koreksi lagi untuk yang selanjutnya, besok, dan seterusnya bahwa kami rapat ini adalah rapat membicarakan tentang RKA (Rencana Kerja Anggaran) Tahun Anggaran 2024 jadi rapat dengar pendapat ya. Maka saya skors 5 menit untuk teman-teman yang selain daripada balai yaitu saya mohon untuk bisa keluar ruangan ya dan tidak juga, saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran karena ini semangat daripada TA kita untuk mengundang semuanya. Kemarin ada permintaan Anggota maka itu diundang.

INTERUPSI F-P. GERINDRA (Ir. SUMAIL ABDULLAH):

Interupsi, Ketua.

KETUA RAPAT:

Iya, silakan.

F-P. GERINDRA (Ir. SUMAIL ABDULLAH):

Begini karena ini sudah apa namanya rapat sudah berlangsung dan sudah ada pemaparan. Saya kira seyogyanya kita tetap libatkan atas *stakeholder* terkait yang ada di sini. Cuma barangkali batasan tentang anggaran yang kita, kita batasi. Maksud saya mungkin ada agenda lain, karena yang akan kita bahas mungkin selain anggaran juga ada ya transportasi yang terintegrasi dengan mereka ini seperti itu. Kami memang merasa apa namanya ada tidak enak hati lah kalau misalkan, ini kan kesalahan teknis saja.

Seperti itu menurut saya.

KETUA RAPAT:

Iya, saya kira, saya menurut saya ya kita fokus untuk kita bahas anggaran, ini bukan pengawasan. Jadi kita agar lebih fokus untuk waktunya sedikit kita ini ya, pembahasan anggaran kita ini cuma sampai tanggal, tanggal berapa, Bu? tanggal 7 kita sudah harus masukan ke... eh tanggal 7 ya. Jadi mohon maaf untuk teman-teman, saya kira supaya kita tidak juga melebar terlalu jauh, jadi kita fokus dengan betul-betul mitra saja, maka saya skors untuk teman-teman yang tadi yang tidak berhubungan langsung selain balai yang langsung di bawah Ditjen.

F-P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Izin.

KETUA RAPAT:

Iya silakan.

F-P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Sebelum ada skors barangkali *eh* skors tetap itulah iya skors sidang. Sebaiknya juga dipertanyakan kepada Dirjen yang terkait karena yang pertama sudah kita undang. Yang kedua, kita lihat yang ada juga di sini kan BUMN ada di dalam. Sejauhmana *sih* keterkaitannya antara BUMN dengan Dirjen yang terkait dalam persoalan pembahasan anggaran. Berangkat dari situ baru Pak Ketua mengambil sikap.

Terima kasih, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik.

Saya persilakan saja dulu Pak Dirjen Laut.

**Plt DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
(Dr. Capt. ANTONI ARIF PRIBADI, M.Sc.):**

Baik.

Terima kasih, Pimpinan.

Memang kami ada PT Pelni dan PT Pelindo. PT Pelni ini adalah sebagian besar operator untuk kapal perintis, kapal tol laut, kapal ternak, dan PSU. Jadi memang dalam beberapa pembahasan rute dan sebagainya kami selalu melibatkan PT Pelni.

Kemudian untuk Pelindo ini lebih kepada BUP (Badan Usaha Pelabuhan), Pak, yang juga dalam pembahasan anggaran tidak langsung terkait dengan pembangunan ataupun rehab dari pelabuhan tapi lebih kepada sisi operasional dari pelabuhan.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Jadi menurut Bapak kan tidak perlu *toh?*

**Plt DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
(Dr. Capt. ANTONI ARIF PRIBADI, M.Sc.):**

Sebenarnya tidak perlu, Pimpinan, tidak perlu dihadirkan karena memang kami hanya mengikuti saran yang sebelumnya bahwa memang diminta untuk mengundang BUMN terkait.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik.

Jadi, kita skors ya 5 menit ya kita beri kesempatan kepada teman-teman yang nanti disampaikan ya.

Baik, saya skors ya.

(RAPAT DISKORS PUKUL 14.05 WIB)

(SKORS DICABUT PUKUL 14.10 WIB)

Selanjutnya, kami persilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pendapat dan pertanyaan. Yang pertama Saudara Ilham Pangestu dari Fraksi Golkar kami persilakan, bersiap-siap Muhammad Aras.

F-P.GOLKAR (ILHAM PANGESTU):

Terima kasih, Ketua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Yang terhormat Ketua, teman-teman Komisi V,
Pak Dirjen Laut beserta jajarannya,**

Beberapa waktu lalu saya ada keliling ke Pulau Peniki, Pak, di bawah Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjung Priok. Bahwasanya saya melihat di sana itu sangat prihatin, Pak, tentang suar itu, dermaganya tidak ada, tempatnya tidak dirawat, semua ini bagian daripada tanggung jawab kita bagaimana masih buruknya sarana penunjang operasional Dermaga Jetty Pak di sana, Pak. Maka untuk instalasi menara suar yang saat ini belum ada, jadi menara suar disana Jetty nya belum ada, Pak. Ini kita rombongan sama kawan melihat

misalkan artinya kalau ada dari dinas kementerian itu datang ke sana itu pakai dermaganya dermaga punya masyarakat, Pak, punya orang. Jadi sementara yang punya tanggung jawab kita itu belum ada dermaganya, maka saya menghimbau kepada Bapak untuk pada tahun 2024 itu bisa dianggarkan anggarannya untuk Jetty. Walaupun ini bukan Dapil pemilihan saya tapi saya merasa *kok* prihatin dengan keadaan bahwasannya ini cuman 1 jam dari Kementerian *kok enggak* bisa ini Jetty sekecil ini saja belum bisa disiapkan. Mungkin ini saja, Pimpinan, dan izinkan saya untuk menyerahkan usulannya, Pimpinan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Silakan.

Iya, sebelum saya ke Pak Muhammad Aras. Saya ingin menyampaikan beberapa hal dulu ya. Yang pertama, saya kira tadi Pak Dirjen sudah membuka bagaimana rencana anggaran yang akan digunakan dengan terang kita tadi ya, cuman kita juga belum terlalu lihat anggaran itu dipakai ke mana saja karena kita tidak masuk ke satuan 3. Jadi, menurut saya kalau kita kasih program juga saat ini, apakah ini bisa terakomodir ya, sedangkan kita bicara ini menurut saya ini final ini, hari ini *nih* karena tanggal 7 itu sudah masuk. Besok kita dengan udara, darat, Rabu kita dengan PUPR, Kamis selesai sudah masuk ya maka saya ingin kita fokus ini.

Kemarin kan kita usulkan ke Bapak Menteri di sini, kesimpulan kita jelas akan memperhatikan usulan Komisi V DPR RI. Apakah yang kita berikan itu ada tidak itu yang menurut saya teman-teman kita fokus di sini. Apa yang kita berikan kemarin ya. Maaf, Pak Dirjen kemarin proposal itu yang berhubungan dengan laut ada *enggak* Pak Menteri kasih? jangan teman-teman, kita kasih ini cuman terima saja tapi ini selesai, tidak keluar ya kan. Padahal kita duduk di sini ada amanatnya, amanat bagiannya pemerintah, bagiannya Dapil kita, sumpah Dapil. Jabatan kita itu untuk menampung aspirasi dan memperjuangkan itu untuk hadir di dalam anggaran ini.

Ingat teman-teman ini selesai ini saya ingin sampaikan, ini final hari ini. Sebagai Pimpinan, saya sampaikan bahwa ini selesai. Itu yang saya minta kita bahas anggaran ini fokus, mari. Dan Pak Dirjen tolong jelaskan juga untuk teman-teman seperti apa, bisa *enggak* apa yang diusulkan kita ini akan tertampung ya, bisa tidak akan tertampung? kalau tidak bisa berubah yang ada ya, saya kembalikan ke teman-teman apakah kita setuju atau tidak ya teman-teman. Kita punya hak *kok* untuk itu ya.

Jadi, jangan lagi kita bicara soal pengawasan itu sudah habis ya. Hari ini kita fokus kita bicara anggaran, kita fokus anggaran ya maka tadi saya minta

tidak ada ini keluar supaya kita fokus anggaran karena kita semua ditonton oleh rakyat ya kan. Di Dapil saya lihat bagaimana saya memperjuangkan Dapil saya ya kan, jangan kita cuman ngomong di sini untuk dilihat saja tetapi tidak bisa dapat dilaksanakan ya. Jadi saya serahkan ke teman-teman.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Izin Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Terima kasih.

Ini saja menginterupsi ya. Terkait apa yang disampaikan oleh Pak Ketua sebenarnya apa yang disampaikan oleh Dirjen pada hari ini itulah perencanaan dari Kementerian Perhubungan untuk memenuhi RPJM mereka, itu harus kita paham dulu. Tetapi hari ini kita rapat harus mampu juga menyesuaikan usulan itu, apakah itu masuk di RPJM apa tidak. Ini kan kendala buat kita, Pak. Sering berbeda antara perencanaan yang dibuat oleh Kementerian Perhubungan dengan apa yang kami usulkan, di sinilah harus dicari titik temunya. Apakah apa yang diusulkan kawan-kawan itu bisa masuk dan bisa mendukung RPJM mereka atau tidak. Karena kita juga ingat bahwa tahun 2024 apa yang kita bahas pada hari ini adalah tahun terakhir anggaran kita tetapkan untuk periode ini, itu, Pak Ketua. Oleh karena itu, biarkanlah ini jalan, kita masukkan usulan itu teman-teman, pertanyaannya disesuaikan apa *enggak?* siapa yang memutuskan itu? Itu satu.

Yang kedua, secara umum juga saya lihat bahwa belum fokus misalnya di Kereta Api Makassar-Parepare apa *sih* yang mau dilaksanakan *item*-nya harus ada di satuan 3. Ini yang tidak pernah juga kita bahas. Saya kira ini saja pembuka rapat kita, Pak Ketua. Boleh kita katakan bahwa apa yang diajukan oleh kementerian ini adalah berdasarkan pikiran-pikiran dan perencanaan mereka.

Terima kasih Pimpinan.

F-P. DEMOKRAT (Drs. H. ANWAR HAFID, M.Si.):

Pimpinan-Pimpinan, tambah sedikit Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-P. DEMOKRAT (Drs. H. ANWAR HAFID, M.Si.):

Iya, terima kasih

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ini tambahan saja, Pimpinan. Terima kasih, Pak Ketua, syukur *alhamdulillah* ya kita belum terlalu jauh tadi, Pak Ketua sudah mengingatkan kita *gitu* ya. Memang hari ini menjadi hari yang sangat penting lah ya dalam hal kita bagaimana memperjuangkan Dapil kita masing-masing karena hari ini bagian proses yang tidak bisa lepas pada saat kita nanti akan mengambil sebuah keputusan begitu.

Pak Hamka tadi sudah menyampaikan bagaimana mensinergikan perencanaan dari Kementerian Perhubungan dan tanggung jawab kami di Dapil. *Nah*, kalau saya sangat setuju sekali walaupun mau dilanjutkan itu ada catatan tersendiri bahwasanya ada ruang di mana untuk penyesuaian itu. Jadi jangan sampai kita lanjut tapi tidak ada ruang penyesuaian itu. Contoh kasus misalkan, belum lama ini kita saya bawa teman-teman ada juga perwakilan dari Perhubungan cukup banyak di Kabupaten Luwuk Utara, itu ada hasil reses tetapi *ndak* masuk satu pun di sini. Itu bukan hasil atau usulan saya sebagai representasi keterwakilan Dapil, tapi ini adalah hasil daripada reses kunjungan Komisi V. Hasil reses saja tidak masuk apa lagi usulan Anggota Komisi V, itu... itu... itu kalau kita mau membandingkan *gitu*.

Jadi, juga tolonglah teman-teman dari Perhubungan, kita juga kerja sesuai dengan aturan yang ada, kami juga bekerja dengan aturan kami yang ada. Jujur saja di depan Pak Menteri kemarin saya sampaikan kita punya pengalaman kita tidak tertib dalam mengeksekusi tentang komitmen terhadap apa-apa yang berhubungan dengan Dapil. Kita punya sejarah ini, 2-3 tahun yang lalu *gitu*.

Jadi, Pak Ketua kalau saya usulkan walaupun mau dilanjutkan ada kesepakatan dulu bahwasanya ada ruang penyesuaian itu, kalau tidak buat apa juga tidak ada dampaknya terhadap Dapil *gitu*. Sementara kita hadir di sini adalah representasi Dapil *gitu*. Jadi tolonglah pelan-pelan kita perbaiki sistem kerja kita ini yang belum kita saling menghormati. Kita ini hanya menghormati ini seperti apa ya apay a seperti gincu *gitu*, kalau gincu yang kita pakai setelah itu selesai keluar dari ruang rapat ini. Silaturahmi kita baru silaturahmi fisik, tapi silaturahmi pemikiran kita kita *ndak* pernah ketemu jarang sekali ketemu.

Jadi marilah sama-sama kita perbaiki ini, jangan kami yang dituntut harus tertib sementara kita pun tidak melakukan itu. Kalau kita mau tertib ayo kita tertib sama-sama, kita perbaiki sama-sama ini sehingga kewajiban kita sama-sama bisa kita jalankan sesuai dengan ruang dan fungsi kita kalau kita memang mau sama-sama memperbaiki ini.

INTERUPSI F-PKS (H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T.):

Interupsi, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Iya, Pak.

F-P. DEMOKRAT (Drs. H. ANWAR HAFID, M.Si.):

Nanti dulu sebentar dulu satu menit lagi. Jadi itu Pak Ketua, saya minta apa saya usulkan kalau seandainya mau dilanjutkan ada... ada... ada... ada sifatnya itu ya *eh* gimana ya ada jaminan lah bahwasanya ada ruang penyesuaian itu, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Hamka tadi.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

INTERUPSI F-PKS (H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T.):

Interupsi, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Pak Suryadi jangan panjang-panjang biar saya (*suara kurang jelas*) khusus ini selesai.

F-PKS (H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T.):

Iya, terima kasih. Karena memang agenda kita ini sebetulnya sangat strategis dan waktu kita mepet, saya merasa ini tidak akan bisa kita selesaikan dalam RDP reguler. Saya usul kita rapat dalam bentuk konsinyering, Pak Ketua. Beberapa masukan sejak beberapa tahun terakhir tidak saja pada waktu rapat kerja dan Pak Menteri yang belum sempat di akomodir atau mungkin juga belum mau diakomodir ini kan belum jelas ada jawabannya. Oleh karena itu, kita skors rapat ini nanti kita buat jadwal ulang konsinyering. Karena terus terang apa yang saya, contoh Pak di Dapil saya ya ini yang dianggarkan itu pembangunan rumah negara golongan 2 tipe D permanen, pembangunan gapura lengkap dengan portal *gate*, pembangunan mushola. Pak Dirjen di

Lombok itu kami tidak perlu dibuatkan mushola jangankan mushola, masjid kami mampu bangun sendiri. Ada 421 pulau di NTB dan 41-nya itu berpenghuni yang kami butuhkan itu infrastruktur untuk bagaimana pelabuhan-pelabuhan ke pulau-pulau kecil *gitu* ya, bukan mushola gitu masjid kami bisa bangun sendiri *enggak* usah dibangunkan oleh APBN begitu. Ini contoh, Pak Ketua.

Oleh karena itu, kita skors ini kita ganti rapat kita nanti dalam konsinyering supaya memastikan apa yang sudah dimasukkan oleh teman-teman melalui proposal yang pekan lalu dengan Pak menteri termasuk juga beberapa tahun terakhir yang tidak diakomodir ini bisa masuk, Pak Ketua.

Terima kasih saya usul kita skors dan kita buat jadwal ulang untuk konsinyering. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik.

Jadi gini teman-teman.

F-P. GERINDRA (Ir. SUMAIL ABDULLAH):

Sedikit-sedikit, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Tunggu biar saya dulu.

F-P. GERINDRA (Ir. SUMAIL ABDULLAH):

Satu menit Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya, inilah yang tadi saya sampaikan supaya kita semua, maka saya bilang fokus dari awal ya. Kan kita sudah minta untuk kalau bisa kita bahas ini lebih lagi dalam maka kita lakukan konsinyering di tempat. Hal ini pun kalau teman-teman setuju konsinyering di sini *enggak* ada masalah, kita selesaikan semuanya di sini ya. Kalau tidak ada kesepakatan ya kami tunggu, itu ya. Jangan sampai nanti kesimpulan kita di atas yang kita baca nanti terakhir di bawah, bukan memahami tetapi di paling di bawah. Mohon memperhatikan semua usulan pendapat Komisi V. Cuma itu doang memperhatikan itu, tetapi tidak ada di dalam apa yang sudah tadi dibacakan.

Maka yang tadi saya inginkan itu misalnya Pak Dirjen bacakan itu, oke sesuai kesimpulan rapat dengan menteri ada ya menampung aspirasi Anggota

Komisi V DPR RI. Di tempat Pak Ridwan ada ini sesuai kemarin usulan yang bisa kami masukkan di dalam perencanaan ini mana? di tempat kami, di Papua mana? di tempat NTB mana? itu yang ingin kita dapatkan ya. Jadi kita tidak lagi berulang-ulang.

Oke, kenapa yang ini tidak masuk alasannya ini, Pak, bahas di kami ya kan. Tadi disampaikan tentang bagaimana program aspirasi yang kita komisi bukan kami perorangan, komisi yaitu di dalam kunjungan kerja, kunjungan Kunker dan Kunsfik. Itu harus diperhatikan itu karena itu membawa nama komisi. Kami berangkat ke sana mempergunakan anggaran rakyat. Di sana diterima, mereka menjamu kami di sana, mereka sampaikan apa yang menjadi beban mereka di daerah yang mereka perlu untuk kita bisa mengatasi beban-beban itu di dalam program-program. Itu yang harus kita lakukan ya kan. Makanya selalu saya minta supaya kita rapat, TA Komisi ini menyiapkan itu.

Kemarin Dirjen Kelautan kemana yang kami kunjungan. Kami waktu itu ke Maluku, mana itu yang diusulkan dari sana? saya yang mimpin loh untuk pelabuhan. Jangan kita pulang, kita lupa teman-teman ya, kita pergi loh tanggung jawab kita kita sudah datang ke sana ya. Ini yang perlu kita selesaikan, jangan kita cuma satu arah saja dari sana kita setuju. Loh kita di sini menanggung jawab kepada masyarakat di daerah kami semuanya, kami tanggung jawab secara komisi mengunjungi daerah-daerah. Tapi kalau itu tidak dilakukan ya percuma kami rapat di sini makanya tadi saya bilang percuma kita rapat, kalau itu tidak bisa ya.

Jadi teman-teman gimana maunya? kalau saya saya minta supaya kita buka semuanya.

INTERUPSI F-P. GERINDRA (Ir. SUMAIL ABDULLAH):

Saya kira begini, interupsi Pimpinan. Ini berkali-kali kita sudah berdiskusi semacam ini dalam forum-forum rapat penting kan. Apa yang kita lakukan dan teman-teman lakukan tertentu ada dasar konstitusionalnya, satu MD3, yang kedua di dalam penyusunan rencana kegiatan dan program ke depan. Beberapa bulan terakhir kita kan sudah pada saat penyampaian-penyampaian di RDP ada usulan kawan-kawan baik yang dilontarkan secara terbuka pada saat forum-forum rapat itu maupun tertulis. Nah, lantas ini tidak ada sama sekali atau mungkin ada sebagian, tentu Pimpinan juga harus menekankan bahwa begitu ini menyangkut satu bukan soal kehormatan atau bagaimana. Jadi satu lembaga tinggi negara yang memang kita bahas dalam rangka satu penganggaran, pengawasan, dan pembentukan undang-undang harus ada wujudnya, Pak. Rencana kerja misalnya kaitannya dengan apa yang telah dilakukan pada saat kunjungan reses tadi. Teman kita menyampaikan dari Sulawesi Selatan atau pada saat kunsfik jangan juga percuma dan lewat begitu saja. Ini karena juga menyangkut anggaran negara yang kita pakai ke sana.

Saya kira ketegasannya begini, Pimpinan. Soal waktu saya kira kita bisa mungkin sampai malam hari atau mungkin besok malam kan juga harus dibedakan antara konsinyering dengan rapat kerja untuk bahas anggaran. Saya sepakat bila ini diskorsing dulu.

terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik.

Teman-teman jadi kita skorsing ini ya. Setuju ya? oke, skorsing, berapa menit? iya skorsing dulu kita diskusi bersama kita terutama bersama Kapoksi-Kapoksi ya. Kita skors berapa? 10 menit? 15 menit ya? oke 15 menit. Kapoksi.

(RAPAT DISKORS PUKUL 14.30 WIB)

Pak Willem, duduk. Saya cabut skorsnya ya.

(SKORS DICABUT PUKUL 14.45 WIB)

Baik.

**Dirjen Perhubungan Laut dan Dirjen Perkeretaapian Kementerian PUPR yang saya hormati dan seluruh jajaran,
Teman-teman Ketua dan seluruh Anggota Komisi V yang saya hormati,**

Saya ingin buka kesempatan untuk teman-teman sesuai apa yang tadi kami sudah Kapoksi sudah berkomunikasi dan hasil komunikasi kami juga dengan teman-teman Dirjen, Pak Dirjen Perhubungan Laut untuk bagaimana dengan hasil kesimpulan rapat komisi selama ini dengan Pak Menteri dan jajaran tentang masukan ya, aspirasi, pendapat ya dari komisi untuk bisa diperhatikan ya kan di dalam APBN 2024.

Untuk itu, saya ingin bertanya kepada teman-teman ya mohon saran masukan. Apakah kita lanjut atau kita tunda? karena sesuai keputusan rapat yang sudah kami lakukan yaitu tidak ada masukan-masukan dan usulan yang tertampung di dalam APBN 2024 ini maka saya kembalikan ke teman-teman dulu Anggota.

Silakan Pak Suryadi dari PKS.

INTERUPSI F-PKS (H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T.):

Interupsi, Pak Ketua.

Karena rapat kita ini kan tujuannya adalah menghasilkan suatu kesimpulan rapat dan ini akan tercatat dalam berita acara. Tetapi substansinya belum ada gambaran. Oleh karena itu, saya usul agar skors ini kita lanjut, Pak Ketua. Jadi kita skors lagi sampai pada batas waktu yang belum kita tentukan dan segera nanti ada rapat Pimpinan bersama Kapoksi dari masing-masing fraksi.

Terima kasih, Pak Ketua.

F-PKB (NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ, M.M.):

Pimpinan,

KETUA RAPAT:

Baik, silakan.

F-PKB (NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ, M.M.):

Terima kasih untuk Pimpinan dan semuanya.

Kalau menurut saya kepentingan kita semua kan sebenarnya bagaimana kemudian antara Komisi V dengan mitra kerja yang hari ini adalah Kementerian Perhubungan itu benar-benar sinergi. Dan saya lihat postur dalam anggaran, program itu tidak menunjukkan itu *gitu* kan wujudnya tidak ada apa bahwa kita itu adalah mitra. Dan sesuai dengan tugas konstitusional kita kan kita itu punya tugas DPR itu ada tiga, selain legislatif ya membuat undang-undang, *budgeting*, juga monitoring. *Nah*, agar tugas konstitusional kita itu bisa dilaksanakan secara maksimal maka saya berharap khusus untuk rapat-rapat yang dengan Dirjen ini mungkin juga bisa disiapkan juga bahan-bahannya itu sampai dengan satuan 3. Dan karena waktu kita sangat singkat *gitu* kan hari ini sangat singkat dan perlu juga cepet-cepet kemudian diputuskan maka saya kira seperti yang mungkin komisi-komisi lain lakukan, ya tidak harus kemudian terbatas di ruangan ini bisa mulai konsinyering sehingga kita tidak ada batas waktu dari pagi sampai siang, dari siang sampai ashar atau sampai jam 3, tapi ketika ini tuntas oke misalkan apabila sampai malam ya sampai malam seperti itu. Benar-benar bahwa keputusannya itu tidak hanya sekedar, mohon maaf, selalu kan di dalam kesimpulan itu memperhatikan masukan-masukan dari Anggota Komisi V. *Nah*, itu kan hanya memperhatikan aja tidak pernah kemudian dilaksanakan. *Nah*, memperhatikan itu mungkin di Raker tetapi kemudian dilaksanakannya itu harusnya ketika rapat-rapat RDP itu sampai kemudian benar-benar wujudnya *tuh* kelihatan seperti itu.

Mungkin itu saja.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Jadi ditunda?

F-PKB (NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ, M.M.):

Ditunda, dilanjut mulai konsinyering.

KETUA RAPAT:

Ya, dua ya.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Izin.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak Hamka.

F-P. GOLKAR (Drs . HAMKA B. KADY, MS):

Terima kasih, Pimpinan.

Sebagai saran, boleh ditunda dengan catatan semua usulan Anggota sudah harus masuk ke kementerian hari ini maka kementerian mempelajari dan menyesuaikan apakah bisa atau tidak kita dengarkan pada rapat berikutnya sehingga apa, dari rapat berikutnya itu kita sudah tahu bahwa ini yang bisa, ini yang tidak bisa, alasannya apa tentu dari kementerian yang kita dengar. Lalu kita mengambil keputusan, Pak Ketua. Jangan sampai kita menunda ini juga hasilnya juga tidak ada nanti.

Oleh karena itu, saran saya oke boleh ditunda beri waktu beliau-beliau Kementerian Perhubungan mempelajari saran ini masukan ini, apakah bisa disesuaikan apa tidak. Kalau tidak apa alasannya, kalau ya tentu oke. Di situ kita diskusi, Pak Ketua, sehingga waktu kita ini karena ada batas waktu di Badan Anggaran juga harus selesai ini kita dibatasi oleh waktu supaya semuanya bisa jalan, sebaiknya, Pak Ketua, hari ini kita tuntaskan masukan-masukan silakan masukan apa yang menjadi aspirasi dari kawan-kawan, nanti Kementerian Perhubungan mempelajari itu.

Saya kira ini, Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Iya. Jadi poinnya ditunda *toh?* Iya.

F-PDIP (Hj. SADARESTUWATI, S.P., M.MA.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Satu lagi, iya Bu Estu.

F-PDIP (Hj. SADARESTUWATI, S.P., M.MA.):

Terima kasih, Pimpinan.

Saya sepakat tetapi kita juga perlu mengingat waktu ya. Dan sepakat juga tolong Pak Dirjen usulan kami untuk Dapil benar-benar diperhatikan, jangan kami ini tidak punya usulan di A tetapi munculnya di A padahal usulan kami usulan B. Ini yang terjadi ya, jangan sampai ini terulang kembali.

Kedua, seperti saya, saya di daerah saya tidak punya Perhubungan Laut saya punya kereta api tapi dari zaman periode ini saya sama sekali tidak pernah padahal saya *ngusulkan*. Waktu itu ramai perkara membuat apa namanya *double track* dari periode saya yang pertama. *Eh, boro-boro* sekarang Bu kita ajak untuk melihat *double track* kerjanya begini-begini-begini. Bagaimana? Apa namanya sudah sampai ini, Bu? *Eh*, paling tidak, sehingga apa? Masyarakat tahu bahwasanya kami ini mengusulkan program tidak hanya diam, duduk, dibayar. Tidak hanya itu tetapi benar-benar memperjuangkan daerah. Dan kalau *toh* kemudian di daerah kami *mbok* ya paling tidak seperti kementerian yang lain dan sebagaimana programnya Pak Presiden untuk padat karya tunai. Dulu pernah ada tetapi ternyata bukan dari daerah saya pekerjanya. Saya bilang pekerjanya semua dari luar daerah dan di desa itu hanya ada satu orang, ini saya tahu karena saya datang dan itupun sudah selesai ketika kepala desa berbicara: "Bu hanya satu".

Apa *sih* yang kami inginkan? Kami ingin masyarakat tahu bahwa kami ini di sini juga bekerja. Saya tidak yakin *kok* di kementerian ini bisa tahu semuanya di bawah seperti apa. Kami yang ada di bawah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, kalau boleh dibilang kami seperti saya, Bu Sri Rahayu ini yang *enggak* pernah berhenti ke daerah pasti akan lebih tahu bagaimana kondisi di daerah. Bukan hanya katanya karena kami turun langsung, kalau kemudian di sini bilangnyanya sudah laporannya begini, begitu kadang dalam hati pengen tertawa. Dipikirkannya kami ini orang goblok *enggak* ngerti apa-apa. Padahal tugas pengawasan selalu kami lakukan, kenapa?

karena kita membahas anggaran bersama-sama di sini. Kalau tugas pengawasan itu tidak dilakukan kita salah.

Dan juga terkait dengan usulan dari daerah-daerah pada saat kita melakukan apa kunjungan terutama kunjungan saat reses. Ini memalukan ketika semua menyampaikan tapi *enggak* ada satupun yang direalisasikan *isin* kalau bahasa Jawa nya *isin buanget*. Kadang satu daerah kita berulang kali datang tapi tidak ada satupun yang direalisasikan itu rasanya malu. Inilah yang sering kita katakan kementerian itu *gawe sak karepe dewe* tanpa ada pembahasan dengan kita, karena apa? karena berpikiran bahwa yang namanya satuan 3 itu *enggak* perlu dibahas di komisi, ini salah kaprah. Semua komisi membahas satuan 3, bagaimana kita akan melakukan pengawasan kalau satuan 3 tidak boleh dibahas di dalam rapat komisi. Tolong ini diperbaiki, Pimpinan, dan kita *strike, strike* kita *enggak* akan *menggak-menggok* dan apa yang terjadi saat ini membukakan mata kita semuanya. Semoga ini sudah terakhir kalinya di manapun.

Terima kasih, Pimpinan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT:

Oke, cukup.

F-P. GERINDRA (Ir. SUMAIL ABDULLAH):

Singkat saja, Gerindra, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Oh, iya silakan.

F-P. GERINDRA (Ir. SUMAIL ABDULLAH):

Jadi memperhatikan beberapa usulan dan alasan-alasan argumentatif nya. Saya pikir kami sepakat untuk menunda.

Itu saja, Pimpinan.

F-P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK):

Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Demokrat, eh Demokrat iya.

F-P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK):

Dari saya, saya lihat ini sudah kita berada pada posisi penghujung kerja-kerja kita baik kita dalam menjalankan fungsi perlindungan dengan mitra. Dan kami lihat posisi mitra ini juga dihadapkan pada situasi yang memang kepepet karena memang satu waktu dan juga kedua terkait dengan di mana mitra dihadapkan pada situasi ketidakstabilan pendanaan yang sedang mereka hadapi sehingga aspirasi ini apakah bisa diakomodir atau tidak bisa dilihat dalam bisa disampaikan kepada kesimpulan rapat. Jadi kalau kita tunda pun pasti kita akan pasti akan hadir pada situasi yang sama juga, apakah aspirasi ini akan diterima atau tidak, itu belum tentu. Kita belum bisa pastikan hari ini karena kita tahu sama-sama mengikuti situasi hari ini memang kita masih dihadapkan pada situasi ketidakstabilan penerimaan negara dalam negeri dan rupiah murni sehingga rapat-rapat Banggar tadi kita dengar masih terus melakukan penambahan terkait tema. Dalam situasi seperti itu kalau kita ngotot ini nanti justru kita tidak ada titik temunya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Iya. Kapoksi Demokrat, kalau Pak Willem lanjut ya? Pak Willem tidak itu ya, jadi itu pribadi. Demokrat Kapoksinya di belakang.

Pak Irwan, silakan.

F-P. DEMOKRAT (Dr. H. IRWAN, S.IP., M.P.):

Iya, terima kasih, Pimpinan.

Pertama, tadi saya lihat juga paparan kementerian. Saya ingatkan bahwa rencana dermaga pembangunan pariwisata tahun depan itu di IKN itu bagi kami *enggak* penting itu ya, terbangun pun tidak ada pariwisata di situ. Yang paling penting adalah bagaimana pembangunan termasuk rehab paspol yang *existing* yang sudah ada di sana, jelas memberikan kontribusi PNBPN ya. Jadi menurut saya *sih* skala prioritas ini sangat penting karena kan pakai duit rakyat.

Terkait agenda hari ini, Pimpinan, saya pikir jelas sekali bagaimana konstitusi memberikan amanah bagi kita wakil rakyat untuk memberikan percepatan pembangunan di masing-masing daerah pemilihan. Menurut saya harus jelas dulu, Pimpinan, baru lanjut.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Jadi ditunda dulu ya?

F-P. DEMOKRAT (Dr. H. IRWAN, S.IP., M.P.):

Ditunda dalam waktu tidak lama, kemudian dilanjutkan agar sesuai dengan tahapan di Badan Anggaran.

KETUA RAPAT:

Aras.

F-PPP (Dr. H. MUH. ARAS, S.Pd., M.M.):

Siap, Ketua, terima kasih.

Jadi kami sesuai dengan rapat tadi bahwa kami mengusulkan juga bahwa ada penyesuaian dulu sebelum dilanjutkan. Artinya apa? bahwa ada pembahasan detail yang disiapkan oleh Pak Dirjen, setelah itu baru kita bisa lanjutkan. Jadi kesiapan-kesiapan mereka dulu untuk menyesuaikan apa yang menjadi usulan teman-teman terutama usulan-usulan kunjungan reses sehingga keputusan kami adalah minta ditunda dengan mengingat kesiapan dari kementerian untuk melanjutkan rapat kita. Begitu, Pak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik.

Hampir semua sudah ya, PAN saja yang tidak hadir ya.

Baik.

Saya kira Dirjen dan seluruh jajaran mohon maaf. Apa yang disampaikan teman-teman ya kalau dibilang ini sudah terlambat, yang buat ini semua adalah dari teman-teman mitra, saya ingin sampaikan bahwa teman-teman mitra itu di bulan Januari itu sudah melakukan sinkronisasi dengan program-program dari daerah. Kalau di daerah itu Musrenbang ya biasanya.

Dan saya dulu 2022 masuk 2023 saya sudah sampaikan dari perencanaan Pak Robi dan CS bahwa tolong ini disiapkan. Pintu ini yang teman-teman ini selalu tutup untuk kami sampai sudah seperti ini baru bilang

ini sudah terlambat. Kenapa tidak disampaikan kepada kita bahwa ini waktunya untuk program-program? Tolong kami minta rapat dengan komisi. Kalau sekarang datang mau ngambil anggaran baru minta rapat dengan kami untuk menyetujui anggaran ya ini kejadiannya, inilah kejadian yang kita alami sekarang dan itu yang dilakukan selama ini dan ini tidak boleh terulang lagi terus-terus seperti ini. Perencanaan harus sudah dilakukan bersama-sama kita. Di komisi ada usulan sesuai dengan tadi disampaikan kunjungan kerja dalam reses, kunjungan spesifik yang kita lakukan kalau ada hal di daerah yang memerlukan kami hadir dan berikan dukungan, kunjungan Anggota ke Dapil, itu semua harus kita lakukan bersama teman-teman kementerian dengan Balai-balai dengan daerah melakukan juga hal itu. Tapi pintu yang kami harus masuk ini ditutup, kami dibuka pada saat untuk menyetujui saja anggaran ini ya. Itu yang selalu dibilang kami sebagai tukang stempel ya. Ini tidak benar teman-teman ya.

Perencanaan itu sudah harus bersama-sama dilakukan ya kan, usulan saya usulan si A, si B, kemarin seperti apa ini, saya sudah minta juga pada waktu itu supaya kalau ada yang belum, ide-idenya belum memenuhi syarat ini bisa dibantu untuk menyiapkan itu ya Pak dan saya yang terakhir tanda tangan Kementerian Perhubungan juga karena saya minta itu, syaratnya itu. Tolong besok, Iya Pak, nanti kami lakukan, dan ini tidak dilakukan. Hari ini saya mimpin, Pak, hari ini saya mimpin. Jangan sudah seperti ini terus kami dihadapkan dengan waktu, itu saja ya.

Maka saya kira hampir semua sudah memberikan tanggapan dan mayoritas menyatakan bahwa kami tunda, kami belum bisa dapat membahas ini ya untuk melanjutkan ya. Dan kami persilakan untuk pemerintah tolong berkoordinasi untuk secepatnya ya, sampaikan kepada TA Komisi untuk kalau bisa besok setelah kita dengan Ditjen Udara dan Darat, kita lanjut. Ya, teman-teman ya? supaya kita mendapat jawaban yang pasti seperti apa untuk kita lanjut ya. Jadi kita skors ya sampai besok ya? atau kita apa? ditunda ya? kita tunda ya sampai besok ya. Nanti jam nya bisa kami disampaikan oleh Bu Nunik ya setelah rapat Kementerian Udara dan Darat.

Ya, sudah nanti kesimpulannya dulu. Baik. Kan belum ini untuk besok kan ditunda saja. Ditunda, ya baik, oke baik kesimpulannya ya baik. Iya draf saya bacakan ya teman-teman ya.

**DRAF KESIMPULAN RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI V DPR RI
DENGAN
DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT DAN DIRJEN PERKERETAAPIAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SENIN, TANGGAL 4 SEPTEMBER.**

1. Komisi V DPR RI bersama Dirjen Perhubungan Laut dan Dirjen Perkeretaapian sepakat untuk menjadwalkan kembali rapat dengar

pendapat terkait alokasi anggaran menurut fungsi dan program masing-masing unit Eselon I K/L mitra kerja Komisi V DPR RI dalam rapat Tahun Anggaran 2024.

Bisa diterima? Anggota?

(RAPAT: SETUJU)

F-P. DEMOKRAT (Drs. H. ANWAR HAFID, M.Si.):

Iya, Pimpinan, sebelum diputuskan, besok kan jadwal kita dengan Dirjen Darat dan Udara. Saya pikir kan ini perlakuannya sama, Ketua kan. Kalau memang besok juga mau kita tunda akan lebih bagus ada pemberitahuan hari ini biar besok tidak ini tidak usah ada rapat lagi.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya-iya baik.

INTERUPSI F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Izin, Pimpinan, interupsi.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Tadi sudah diputuskan bahwa ditunda. Kita juga harus mengetahui apa hasil daripada penundaan itu nanti *gitu loh*. Jangan nanti ditunda terus, kita kan waktu ini sangat terbatas. Maksud saya adalah semua usulan dari Anggota silakan masukkan hari ini, bagi yang belum, besok pada saat kita mulai pembahasan, yang dibahas itu apa iya atau tidak. Kalau tidak apa alasannya, kalau ya lanjut kan seperti itu Sehingga kita semua selesai sesuai dengan rencana, Pak Ketua. Saya kira itu saja supaya ada target kita untuk bisa mencari titik temu, kalau tidak ya keputusan terakhir ada dari Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya baik, nanti saya suruh tambah satu poin lagi ya. Tunda ini karena ada poin satu lagi nanti tolong dimasukin. Tayangin aja *tuh*. Baik, ya, jadi yang satu sudah jelas tadi ya kita ditunda untuk jadwalkan kembali.

2. Komisi V meminta Dirjen Perhubungan Laut dan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan untuk menyempurnakan alokasi anggaran dalam RAPBN Tahun 2024 sesuai dengan usulan, saran, dan pendapat Komisi V DPR RI.

Ini yang selalu terus-terus tidak masuk ini, usulan dua ini *nih* ini yang bermasalah terus ini. Ya, jadi setuju ya? Pak Hamka?

F-PDIP (SRI RAHAYU):

Izin Pimpinan, izin Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya, baik, Bu.

F-PDIP (SRI RAHAYU):

Untuk usulan, itu menurut saya harus dibahas rapat komisi, khusus komisi, Pak. Jadi itu bukan usulan orang per orang tetapi usulan komisi baik itu yang apa usulan yang dari teman-teman Anggota maupun dari hasil kunjungan baik itu Kunsfik maupun komisi sehingga itu posisinya kuat. Kalau orang per orang ya sudahlah, tetapi bagi teman-teman yang tidak mengusulkan *nggak* usah protes begitu karena memang *ndak* ada usulan.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya, saya kira dijelaskan juga untuk ini kita lanjutkan besok karena ini kita tunda sampai besok ya. Jadi supaya jelas ya kesimpulannya ya bahwa ini ditunda sampai besok nanti setelah kita dengan Dirjen Laut dan Udara *eh* Dirjen Darat dan Udara ya. Dimasukin langsung sampai besok ya setelah saja, setelah, setelah nanti. Ya, pukul 14.00 saja masukin-nya tergantung nanti besok kalau cepat lebih baik. Baik, sudah ada perbaikan, saya tawarkan kepada Anggota.

1. Komisi V DPR RI bersama Dirjen Perhubungan Laut dan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan sepakat untuk

menjadwalkan kembali rapat dengar pendapat terkait alokasi anggaran menurut fungsi dan program masing-masing unit Eselon I dalam RAPBN Tahun Anggaran 2024 pada Selasa, 5 September 2023 pukul 14.00.

2. Komisi V DPR RI menerima meminta Dirjen Perhubungan Laut dan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan untuk menyempurnakan alokasi anggaran dalam RAPBN Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan usulan, dan saran, dan pendapat Komisi V DPR RI

Anggota?

(RAPAT: SETUJU)

Pemerintah?

(RAPAT: SETUJU)

Baik.

Demikian, Saudara-Saudara apabila tidak ada hal-hal yang perlu kita bahas lagi maka sesuai dengan aturan Tata Tertib Pasal 283, kita akan menyelesaikan ya, perumusan tadi sudah.

Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua dan Dirjen Perhubungan Laut dan Dirjen Perkeretaapian dalam rapat dengar pendapat pada siang hari ini.

Terima kasih atas kehadirannya.

Rapat dengar pendapat pada hari ini saya tutup.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.15 WIB)

JAKARTA, 4 September 2023

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

TTD

NUNIK PRIHATIN BUDIASTUTI, S.H.
NIP. 196912021998032002

